



Pemkot Siapkan Rp 8,5 Miliar

■ 35 Kelurahan di Yogya Masih Masuk Kategori Kumuh

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak tujuh kelurahan yang masuk ke dalam daftar kawasan kumuh di Kota Yogyakarta kembali dilakukan penanganan. Pasalnya, desain detail perencanaan pembangunan atau *Detail Engineering Design* (DED) telah selesai disusun, selanjutnya dapat diimplementasikan dalam beberapa waktu ke depan.

"Tujuh kelurahan yang sudah kami persiapkan DED-nya, sehingga kami tinggal lakukan pelaksanaan," ujar Pjt Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta, Hendra Tantular, Minggu (27/3).

Ketujuh kelurahan yang dimaksud yakni Kelurahan Keparakan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Gwangan, Kelurahan Pandean, Kelurahan Brontokusuman, dan Kelurahan Suryatmajan.

Dana sebanyak Rp 15 miliar hasil kucuran bantuan dari pemerintah pusat digunakan untuk upaya penataan kawasan kumuh, namun hanya Rp 8,5 miliar saja yang dipersiapkan perencanaannya untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta.

Akhirnya dana yang tak terpakai dalam perencanaan sebanyak Rp 7 miliar dikembalikan kepada pemerintah pusat. "Dari 15 miliar itu, yang bisa kami persiapkan perencanaan adalah Rp 8,5



Dari 15 miliar itu, yang bisa kami persiapkan perencanaan adalah Rp 8,5 miliar. Sedangkan sisanya kami kembalikan ke pusat

HENDRA TANTULAR

Pjt Kepala Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

miliar. Sedangkan sisanya kami kembalikan ke pusat," tutur Hendra.

Namun pada pelaksanaannya, tahun 2016 ini, penanganan kawasan kumuh tersebut telah diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Satker Pengembangan Permukiman (Bankim) yang ada di DIY.

Hendra berharap, supaya program tak bertumpang tindih, maka sebaiknya dapat dilaksanakan koordinasi secara intensif. "Hasil perencanaan pemerintah pusat yang hendak digarap di Yogyakarta sebaiknya dapat dikordinasikan bersama. Pasalnya, kami juga tengah menyusun program serupa,

DED penataan kawasan kumuh berbasis kelurahan," ujarnya.

Penanganan kawasan kumuh di tujuh kelurahan meliputi pembangunan talud permukiman, ruang terbuka hijau publik (RTHP), jalan, sampai saluran irigasi air untuk pengairan.

"Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) akan melakukan penjarangan tahap pertama. Pemerintah melalui satker pusat juga melaksanakan penanganan kawasan kumuh ini, nah diharapkan perencanaan yang ada dapat dikomunikasikan ke kita," ujar Hendra.

Luasan

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, sebanyak 35 kelurahan masuk ke dalam kawasan kumuh perkotaan. Kawasan kumuh di Yogyakarta dihitung mencapai 278,7 hektare atau 8,17 persen dari total wilayah.

"Lokasinya tersebar dan sebagian besar berada di wilayah permukiman bantaran sungai," ujar Edy Muhammad, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta.

Selain Kota Yogyakarta, Bandung dan Bogor juga mendapat alokasi dana dari plafon anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah sebanyak Rp 42 miliar secara keseluruhan untuk penanganan kawasan kumuh di masing-masing daerah. (rdk)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Permukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005